

PENGADILAN NEGERI SANGGAU (099113)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI

Sanggau - Kalimantan Barat 78512

Telp. 0564-21191 Fax. 0564-21443

e-mail : admin@pn-sanggau.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01.099113

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI

Telp. 0564-21191 Fax. 0564-21443

Sanggau - Kalimantan Barat 78512

e-mail : admin@pn-sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sanggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sanggau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sanggau, 20 Januari 2023
Sekretaris,

Zulkarnain, S. Kom., M. Ak.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	14
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	19
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	22
F. Pengungkapan Penting Lainnya	23
VI. Lampiran dan Daftar	24



PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 / XXI, Sanggau – Provinsi Kalimantan Barat
Telp/Fax. 0564 – 21443, email : admin@pn-sanggau.go.id
website : www.pn-sanggau.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sanggau, 20 Januari 2023
Sekretaris,

Zulkarnain, S. Kom., M. Ak.
NIP. 19850730 200904 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.779.720 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp19.779.720 atau mencapai 133,74 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp14.790.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.864.230.205 atau mencapai 99,20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.903.575.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022 . Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.622.166.129 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp16.842.300; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17.458.769.468 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp146.554.361.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.361.090 dan Rp17.593.805.039

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.995.120 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.588.198.552 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp5.565.203.432, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.565.203.432.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp18.159.797.986, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-5.565.203.432 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 4.999.210.485 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp17.593.805.039.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2022				TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah						
Pendapatan Negara Bukan Pajak		14.790.000	19.779.720	4.989.720	133,74	18.424.684
Jumlah Pendapatan Dan Hibah		14.790.000	19.779.720	4.989.720	133,74	18.424.684
Belanja						
Belanja Pegawai		3.585.747.000	3.572.062.317	(13.684.683)	99,62	3.401.186.364
Belanja Barang		1.253.828.000	1.231.673.988	(22.154.012)	98,23	1.106.640.843
Belanja Modal		64.000.000	60.493.900	(3.506.100)	94,52	237.484.000
Jumlah Belanja		4.903.575.000	4.864.230.205	(39.344.795)	99,20	4.745.311.207

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	16.842.300	11.664.150
JUMLAH ASET LANCAR		16.842.300	11.664.150
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	12.434.675.000	12.434.675.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.009.595.414	3.788.941.514
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5.671.489.407	5.671.489.407
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	159.036.000	159.036.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	9.739.869	9.739.869
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(4.825.766.222)	(4.039.718.520)
JUMLAH ASET TETAP		17.458.769.468	18.024.163.270
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	4.400.000	4.400.000
Aset Lain-lain	C.3.2	310.754.400	310.754.400
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(168.600.039)	(155.043.214)
JUMLAH ASET LAINNYA		146.554.361	160.111.186
JUMLAH ASET		17.622.166.129	18.195.938.606
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	25.145.690	29.709.820
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	3.215.400	6.430.800
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		28.361.090	36.140.620
JUMLAH KEWAJIBAN		28.361.090	36.140.620
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	17.593.805.039	18.159.797.986
JUMLAH EKUITAS		17.593.805.039	18.159.797.986
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.622.166.129	18.195.938.606

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	22.995.120	21.640.084
JUMLAH PENDAPATAN		22.995.120	21.640.084
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.572.320.727	3.414.877.364
Beban Persediaan	D.3	42.284.950	40.141.100
Beban Barang dan Jasa	D.4	620.386.298	580.053.851
Beban Pemeliharaan	D.5	448.030.050	389.431.148
Beban Perjalanan Dinas	D.6	105.572.000	107.607.429
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	799.604.527	758.504.512
JUMLAH BEBAN		5.588.198.552	5.290.615.404
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.565.203.432)	(5.268.975.320)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.565.203.432)	(5.268.975.320)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(5.565.203.432)	(5.268.975.320)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI SANGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Uraian	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	18.159.797.986	18.603.281.783
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(5.565.203.432)	(5.268.975.320)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.999.210.485	4.825.491.523
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(565.992.947)	(443.483.797)
EKUITAS AKHIR	E.5	17.593.805.039	18.159.797.986

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM*Profil dan
Kebijakan Teknis***A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sanggau**

Pengadilan Negeri Sanggau diresmikan pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1/XXI Sanggau.

Pengadilan Negeri Sanggau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Negeri Sanggau berkomitmen dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan peradilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan***A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sanggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis Akuntansi***A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Negeri Sanggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran***A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sanggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10,0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50,0%
Macet	Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100,0%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.06/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 Tahun
<i>Franchise</i>	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.529.045.000. Selama tahun 2022, dilakukan revisi atas DIPA awal Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.790.000	14.790.000
Jumlah Pendapatan	14.790.000	14.790.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.258.251.000	3.585.747.000
Belanja Barang	1.206.794.000	1.253.828.000
Belanja Modal	64.000.000	64.000.000
Jumlah Belanja	4.529.045.000	4.903.575.000

Realisasi
Pendapatan
Rp19.779.720

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.779.720 atau mencapai 133,74 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.790.000. Pendapatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan)	14.790.000	19.779.720	133,74
Jumlah	14.790.000	19.779.720	133,74

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan TA 2022 mengalami kenaikan 7,35 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan sewa gedung dan bangunan dengan bertambahnya pegawai/hakim yang menempati rumah dinas .

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan)	19.779.720	18.424.684	7,35
Jumlah	19.779.720	18.424.684	7,35

Realisasi Belanja
Rp4.864.230.205

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Sanggau pada TA 2022 adalah sebesar Rp4.864.230.205 atau 99,20 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.903.575.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.585.747.000	3.573.878.318	99,67
Belanja Barang	1.253.828.000	1.231.673.988	98,23
Belanja Modal	64.000.000	60.493.900	94,52
Total Belanja kotor	4.903.575.000	4.866.046.206	0,77
Pengembalian Belanja Pegawai	-	1.816.001	(100)
Jumlah	4.903.575.000	4.864.230.205	99,20

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,51% dibandingkan dengan periode TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya Belanja Pegawai dikarenakan Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai (hakim) dan perekrutan CPNS baru tahun 2022.
2. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktifitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	3.572.062.317	3.401.186.364	5,02
Belanja Barang	1.231.673.988	1.106.640.843	11,30
Belanja Modal	60.493.900	237.484.000	(74,53)
Jumlah	4.864.230.205	4.745.311.207	2,51

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp3.572.062.317

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.572.062.317 dan Rp3.401.186.364. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,02 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai (hakim) dan perekrutan CPNS baru tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.573.878.318	3.401.926.481	5,05
Jumlah Belanja kotor	3.573.878.318	3.401.926.481	5,05
Pengembalian Belanja Pegawai	1.816.001	740.117	145,37
Jumlah Belanja	3.572.062.317	3.401.186.364	5,02

Realisasi Belanja
Barang
Rp1.231.673.988

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.231.673.988 dan Rp1.106.640.843. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,30% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan, antara lain :

1. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.
2. Peningkatan belanja jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	502.393.383	457.954.801	9,70
Belanja Barang Persediaan	57.639.400	60.239.850	(4,32)
Belanja Jasa	128.215.455	102.090.315	25,59
Belanja Pemeliharaan	437.853.750	378.748.448	15,61
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.572.000	107.607.429	(1,89)
Jumlah Belanja Kotor	1.231.673.988	1.106.640.843	11,30
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	1.231.673.988	1.106.640.843	11,30

Realisasi Belanja
Modal
Rp60.493.900

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp60.493.900 dan Rp237.484.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 74,53% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh adanya penurunan alokasi anggaran belanja modal pada periode ini dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.493.900	237.484.000	(74,53)
Jumlah Belanja Kotor	60.493.900	237.484.000	(74,53)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	60.493.900	237.484.000	(74,53)

Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp60.493.900

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp60.493.900 dan Rp237.484.000, mengalami penurunan sebesar 72,25 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh terdapat penurunan Realisasi Belanja Modal Periode Berjalan dibanding Periode Sebelumnya disebabkan berkurangnya alokasi anggaran Belanja Modal pada periode ini .

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Kursi Fiber Glas/Plastik	5.400.000	-	-
P.C Unit	50.493.900	108.740.616	(53,56)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10.000.000	-	-
Televisi	-	27.827.076	(100,00)
Loudspeaker	-	19.587.076	(100,00)
Audio Mixing Console	-	10.996.769	(100,00)
Camera Conference	-	52.776.776	(100,00)
Microphone	-	10.194.459	(100,00)
Microphone Table Stand	-	6.564.459	(100,00)
Microphone/Boom Stand	-	796.769	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	65.893.900	237.484.000	(72,25)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	65.893.900	237.484.000	(72,25)

Aset Lancar
Rp16.842.300

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.16.842.300 dan Rp.11.664.150.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan
Rp16.842.300

C.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp16.842.300 dan Rp11.664.150 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1
Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Konsumsi	15.222.800	10.833.750
Bahan untuk Pemeliharaan	1.619.500	830.400
Jumlah	16.842.300	11.664.150

Semua jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam keadaan baik.

Aset tetap
Rp17.458.769.468

C.2 ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.458.769.468 dan Rp. 18.024.163.270.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Akuntansi Bogor berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp12.434.675.000

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp12.434.675.000 dan Rp12.434.675.000. Nilai Tanah tersebut tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Rincian Tanah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	922	Jl. Gajahmada No. 3, Sanggau	1.799.892.000
2	200	Jl. Setia Budi No. 19, Sanggau	378.672.000
3	2.000	Jl. Sutan Syahrir, Sanggau	688.883.000
4	2.713	Jl. Jend. Sudirman No. 1, Sanggau	6.513.913.000
5	1.200	Jl. Raya Tayan, Kab. Sanggau	609.963.000
6	1.000	Jl. Alex Karlim, Balai Karangan	214.812.000
7	1.480	Jl. Sekadau-Sintang	2.228.540.000
Jumlah			12.434.675.000

Tanah seluas 2.713 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Sanggau pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan pihak ketiga untuk pengelolaan kantin kantor Pengadilan Negeri Sanggau.

Peralatan dan
Mesin
Rp4.009.595.414

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.009.595.414 dan Rp. 3.788.941.514.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 3
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	3.788.941.514
Mutasi tambah:	
Pembelian	65.893.900
Transfer Masuk	154.760.000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2022	4.009.595.414
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(3.087.016.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	922.579.289

Mutasi tambah peralatan mesin antara lain adalah sebagai berikut :

- Pembelian Alat Rumah Tangga berupa Kursi Fiber Glas/Plastik senilai Rp. 5.400.000,- ;
- Pembelian Komputer Unit berupa P.C. Unit senilai Rp. 50.493.900,- ;
- Pembelian Peralatan Komputer berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp. 10.000.000,- ;
- Transfer Masuk Komputer Unit berupa Laptop senilai Rp. 134.910.000,- ;
- Transfer Masuk Peralatan Komputer berupa Scanner (Peralatan Personal) senilai Rp. 19.850.000,- ;

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp5.671.489.407

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.671.489.407 dan Rp. 5.671.489.407. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp159.036.000

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.159.036.000 dan Rp.159.036.000. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp9.739.869

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.9.739.869 dan Rp.9.739.869. Nilai Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.

Rincian aset tetap Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp4.825.766.222

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.825.766.222 dan Rp. 4.039.718.520.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Tabel. 4
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.009.595.414	(3.087.016.125)	922.579.289
2	Gedung dan Bangunan	5.671.489.407	(1.641.801.563)	4.029.687.844
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.036.000	(96.948.534)	62.087.466
4	Aset Tetap Lainnya	9.739.869	-	9.739.869
Akumulasi Penyusutan		9.849.860.690	(4.825.766.222)	5.024.094.468

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp146.554.361

C.3 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 146.554.361 dan Rp. 160.111.186.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Akuntansi Bogor terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak
Berwujud
Rp4.400.000

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp4.400.000 dan Rp4.400.000 Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Sanggau berupa Software (Lisensi Antivirus) yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Software (Lisensi Antivirus)	4.400.000
Jumlah		4.400.000

Aset Lain-lain
Rp310.754.400

C.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp310.754.400 dan Rp310.754.400. Nilai Aset Lain-lain tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Sanggau.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
168.600.039*

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 168.600.039 dan Rp. 155.043.214. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel. 6
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Antivirus)	4.400.000	(4.400.000)	-
	Jumlah	4.400.000	(4.400.000)	-
B.	Aset Lain-lain	310.754.400	(164.200.039)	146.554.361
	Jumlah	310.754.400	(164.200.039)	146.554.361
	Total	315.154.400	(168.600.039)	146.554.361

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp28.361.090*

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Negeri Sanggau per per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 28.361.090 dan Rp. 36.140.620.

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp25.145.690*

C.4.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.215.400 dan Rp6.430.800.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari sewa kantin di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Sanggau yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel.7
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Sewa Kantin Kantor)	3.215.400
Jumlah	3.215.400

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan Diterima Dimuka bersumber dari sewa kantin di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Sanggau yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp25.145.690

C.4.2 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp25.145.690 dan Rp29.709.820, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.8
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	21.653.410	21.395.000
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	3.492.280	8.314.820
Jumlah	25.145.690	29.709.820

Penjelasan tentang Beban yang Masih Harus Dibayar :

Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut

Beban Barang Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang sifatnya non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Ekuitas Rp.
17.593.805.039

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.593.805.039. dan Rp18.159.797.986. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp22.995.120

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp22.995.120 dan Rp21.640.084. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.995.120	21.640.084	6,26
Jumlah	22.995.120	21.640.084	6,26

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang merupakan pendapatan sewa rumah dinas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau.

Beban Pegawai
Rp3.572.320.727

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.572.320.727 dan Rp3.414.877.364. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Gaji	3.572.320.727	3.414.877.364	4,61
Jumlah Beban	3.572.320.727	3.414.877.364	4,61

Beban
Persediaan
Rp42.284.950

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.284.950 dan Rp40.141.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Persediaan konsumsi	42.284.950	40.141.100	5,34
Jumlah Beban	42.284.950,00	40.141.100	5,34

Beban Barang dan Jasa
Rp620.386.298

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 620.386.298 dan Rp. 580.053.851. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya optimalisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 dan terdapat tagihan listrik dan telepon yang meningkat dibanding periode sebelumnya. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami kenaikan, terdapat beban honor operasional satker yang mengalami penurunan disebabkan terdapat beberapa pegawai di satker yang menduduki Jabatan Fungsional Perbendaharaan yang mendapat honorarium maksimal 40% dari nilai SBM Tahun Anggaran 2022.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	433.637.528	350.683.944	23,65
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	11.913.500	11.757.500	1,33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37.464.000	41.058.000	(8,75)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	39.678.000	(100,0)
Beban Langganan Listrik	78.839.403	71.380.879	10,45
Beban Langganan Telepon	2.650.427	1.129.571	134,64
Beban Langganan Air	2.149.650	3.293.970	(34,74)
Beban Sewa	33.928.500	25.920.000	30,90
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.400.000	2.042.500	164,38
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.403.290	15.553.800	(7,40)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	17.555.687	(100,0)
Jumlah Beban	620.386.298	580.053.851	6,95

Beban Pemeliharaan
Rp448.030.050

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 448.030.050 dan Rp. 389.431.148. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Beban Pemeliharaan terjadi karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	220.618.400	179.519.659	22,89
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.081.000	16.778.200	(16,08)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203.154.350	182.450.589	11,35
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10.176.300	10.682.700	(4,74)
Jumlah Beban	448.030.050	389.431.148	15,05

Beban Perjalanan
Dinas
Rp105.572.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 105.572.000 dan Rp. 107.607.429.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas disebabkan oleh berkurangnya frekuensi perjalanan dinas dengan tujuan konsultasi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun ke KPKNL. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	102.932.000	104.967.429	(1,94)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.640.000	2.640.000	-
Jumlah Beban	105.572.000,00	107.607.429	(1,89)

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp799.604.527

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 799.604.527 dan Rp. 758.504.512. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	444.252.366	402.602.351	10,35
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	338.693.629	338.693.629	-
Beban Penyusutan Irigasi	1.694.207	1.694.207	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.407.500	1.407.500	-
Jumlah Penyusutan	786.047.702	744.397.687	5,60
Beban Amortisasi Software	550.000	1.100.000	(50,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	13.006.825	13.006.825	-
Jumlah Amortisasi	13.556.825	14.106.825	(3,90)
Jumlah	799.604.527	758.504.512	5,42

Kegiatan Non
Operasional Rp. 0

D.8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2022 dan 2021.

Pos Luar Biasa
Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2022 dan 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
18.159.797.986,00*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.159.797.986,00 dan Rp. 18.603.281.783,00

*Surplus/Defisit-LO
Rp.5.565.203.432*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.565.203.432 dan Rp. 5.268.975.320. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Kebijakan
Akuntansi Rp.0,00*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp4.999.210.485*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.999.210.485 dan Rp. 4.825.491.523.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

*Tabel.9
Transaksi Antar Entitas TA 2022*

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.864.230.205
Diterima dari Entitas Lain	(19.779.720)
Transfer Masuk	154.760.000
Jumlah	4.999.210.485

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp. 4.864.230.205, sedangkan DDEL sebesar Rp. 19.779.720.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0. Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp154.760.000.

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Badan Urusan Administrasi	154.760.000
Jumlah		154.760.000

*Ekuitas Akhir
Rp17.593.805.039*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.17.593.805.039,00 dan Rp.18.159.797.986,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Rollout SAKTI Full Modul termasuk Modul Pelaporan dimulai pada tahun anggaran 2022. Implementasi SAKTI pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau telah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2022, diawali dengan Migrasi Data Saldo Awal dari Data Audited 2021 Aplikasi E-Rekon&LK ke Database Aplikasi SAKTI.
- Pada pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022 terdapat catatan *Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB* pada Monitoring Modul Pelaporan Aplikasi MONSAKTI disebabkan adanya transaksi belanja barang (52111-Penggantian Inventaris Kantor) yang membentuk Aset Intrakomtabel. Catatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti mengingat alokasi waktu tidak mencukupi untuk melakukan perubahan/revisi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB tersebut sebagai berikut :

Rincian Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Akun	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen
1.	521111	3050201020	2	2.700.000	5.400.000	16	24 Okt 2022

- Mulai Tahun Anggaran 2023 terkait alokasi Belanja Daya dan Jasa berupa Langganan Listrik untuk seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung telah dibayarkan secara terpusat dan dibebankan pada DIPA Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung RI.